KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN
PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital pemerintahan merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap arsitektur SPBE yang telah ada. Komisi Penyiaran Indonesia telah memiliki Arsitektur SPBE 2022-2024 yang disusun pada tahun 2022, namun seiring dengan dinamika perkembangan teknologi dan regulasi terbaru, diperlukan penyesuaian yang komprehensif untuk menentukan kondisi saat ini (*as-is*) dan kondisi yang diharapkan (*to-be*) dalam konteks penyesuaian ke dalam Pemerintah Digital (PEMDI).

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian implementasi dari peta rencana periode sebelumnya, mengidentifikasi komponen *to-be* yang sudah terimplementasi akan dijadikan *as-is* untuk tahun mendatang, serta menentukan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan untuk menyesuaikan arsitektur SPBE, sekarang dikenal dengan Arsitektur PEMDI, dengan kebutuhan transformasi digital yang lebih komprehensif. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, KPI memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal sebagai SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan tools untuk menggambarkan kegiatan pelaksanaan urusan KPI secara menyeluruh di Lingkungan KPI. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Kemen PAN&RB dalam rangka mewujudkan Komisi Penyiaran Indonesia membangun sinergitas dan koordinasi proses dan prosedur penyelenggaraan keamanan nasional melalui proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, melalui kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Anggaran 2026, Komisi Penyiaran indonesia berencana akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia.

II. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari kegiatan ini, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
7. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Arsitektur SPBE Komisi Penyiaran Indonesia sebelumnya adalah untuk menentukan kondisi *as-is* dan *to-be* ke dalam konteks Pemerintah Digital serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut strategis.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu menganalisis Arsitektur SPBE *as-is* dan *to-be* pada periode sebelumnya untuk dijadikan Arsitektur *as-is* di periode mendatang. Termasuk integrasi Peta Proses Bisnis KPI dalam Arsitektur yang dikembangkan.

Pendampingan dan bimbingan dalam penyusunan arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2026 – 2030 oleh konsultan atau tenaga profesional untuk memastikan proses berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan

standar yang berlaku. Pekerjaan arsitektur disusun untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpadu serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Komisi Penyiaran indonesia Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

a. Analisis Kondisi saat ini (*as-is*)

Melakukan analisis terhadap kondisi eksisting di lingkungan Komisi Penyiaran indonesia termasuk arsitektur proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan yang sudah berjalan. Pada tahap ini juga mencakup proses identifikasi permasalahan serta tantangan yang ada;

b. Perancangan Arsitektur Target (*to-be*)

Melakukan perancangan arsitektur SPBE yang ideal untuk tahun 2026-2030 yang melibatkan perumusan model proses bisnis terintegrasi, standarisasi data, desain layanan dan aplikasi terpusat, serta perencanaan infrastruktur dan keamanan yang kuat.

c. Pengembangan Peta Proses Bisnis KPI yang terintegrasi dengan Arsitektur PEMDI

Mengembangkan Peta Proses Bisnis yang terimplementasi dalam sistem arsitektur PEMDI KPI yang menggambarkan hubungan Peta Proses Bisnis terhadap domain-domain arsitektur PEMDI.

d. Pendampingan dan Transfer Pengetahuan

Melakukan bimbingan dan pendampingan intensif kepada tim internal SPBE KPI dalam pembaruan Arsitektur PEMDI KPI sehingga tim memiliki kapasitas dalam implementasi penyusunan serta pengelolaan Pemerintah Digital.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia adalah selama 2 (dua) Bulan, yaitu pada Bulan April sampai Mei 2026.

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
A	**FASE PERSIAPAN**								
	1. Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal								
	2. Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan								
	3. Melaksanakan tinjauan dokumen pendukung								
	a. Inventaris seluruh								

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	data referensi-domain arsitektur PEMDI								
	b. Analisis referensi-domain arsitektur PEMDI								
	c. Analisis Peta Proses Bisnis KPI mulai dari level 0 (Peta Proses) hingga level n (Peta Lintas Fungsi)								
	d. Menyusun referensi-domain PEMDI								
	e. Analisis lingkungan strategis untuk penyusunan Arsitektur								
	4. Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker								
B	**FASE PELAKSANAAN/ PENYUSUNAN**								
	1. *Workshop* Awal								
	2. Melakukan analisis pencapaian *to-be* yang sudah terimplementasi								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
	2. Draf Arsitektur PEMDI								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis (termasuk peyusunan Peta Lintas Fungsi), Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
C	**FASE PELAPORAN/ FINALISASI**								
	1. Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain								
	2. Penyusunan Dokumen dan Finalisasi								
	3. Pelaporan								

VI. KEY PERFORMANCE INDICATOR

Key Performance Indicator merupakan serangkaian proses yang tertuju pada aspek-aspek kinerja yang disepakati untuk menilai keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan atau jasa konsultansi.

Key Performance Indicator dalam Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

A. Key Performance Indicator terhadap Sasaran/Output

No	Sasaran/Output	Key Performance Indicator (KPI)	Target	Cara Pengukuran
1	**Dokumen Arsitektur Pemereinta Komisi Penyiaran Indonesia**	**Presentase Laporan yang disetujui**	**100%**	**Laporan Disetujui Tanpa Perbaikan**

B. Key Performance Indicator terhadap Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Pelaksanaan Kegiatan	Key Performance Indicator (KPI)	Target	Cara Pengukuran
1.	**FASE PERSIAPAN**	**Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan**	**20%**	**Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan yang telah disetujui oleh Kpi dan Tanpa Perbaikan**
	1. Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal	- Terlaksananya Pembentukan Tenaga Ahli dan Paparan untuk Kick Of Meeting bersama KPI - Terlaksananya Rapat Kick Of Meeting bersama KPI	8%	- Tersusunnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang telah disepakati sampai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
	2. Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan Arsitektur PEMDI KPI	- Pembahasan Dokumen-Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI	2%	- Terkirimya Dokumen Pendukung Terkait Arsitektur PEMDI dari KPI ke Penyedia
	3. Melaksanakan tinjauan dokumen pendukung	- Menganalisa Dokumen Pendukung yang telah terikim dari KPI	7%	- Menganalisa Dokumen Pendukung Terkait 1. Inventaris seluruh data referensi-domain arsitektur PEMDI 2. Analisis referensi-domain arsitektur PEMDI 3. Menyusun

				referensi-domain PEMDI 4. Analisis lingkungan strategis untuk penyusunan Arsitektur
	4. Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker	- Menyusun Jadwal untuk Mengumpulkan Data Terkait Arsitektur PEMDI KPI yang belum terkirim dari Satker2 Terkait	3%	- Tersusunnya Jadwal ke Satker2 Terkait untuk dilakukan pengupulan data terkait dan jadwal disusun bersama KPI
2.	**FASE PELAKSANAAN/ PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMDI**	- **Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan/Penyusunan Arsitektur PEMDI**	**60%**	- **Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan yang telah disetujui oleh Kpi dan Tanpa Perbaikan**
	1. Kegiatan Workshop Awal	- Terlaksananya Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI	10%	- Melaksanakan Koordinasi Tempat, Waktu dan Tanggal dilaksanakanny a Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Melaksanakan Koordinasi Jumlah Satker-Satker atau Jumlah Orang yang di Undang untuk Menghadiri Kegiatan Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Tersusunnya Undangan Workshop Awal
	2. Melakukan analisis pencapaian *to-be* yang sudah terimplementasi	- **Melakukan** analisis pencapaian *to-be* yang sudah terimplementasi	30%	- Melakukan Analisis To-Be terhadap Domain Sebagai Berikut : - Domain

				Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur dan - Domain Keamanan
	3. Draf Arsitektur PEMDI	- Membuat Draf Arsitektur PEMDI	20%	- Tersusunnya Draft Arsitektur PEMDI - Domain Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur dan - Domain Keamanan
3.	**FASE PELAPORAN/ FINALISASI**	- **Terlasananya Seluruh Dokumen Arsitektur PEMDI KPI**	**20%**	- Melakukan Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain - Melakukan Revisi terhadap Masukan Dokumen Draf Penyusunan Dokumen Arsitektur PEMDI - Finalisasi Dokumen yang sudah di revisi sehingga dapat dicetak - Penyerahan Dokumen Arsitektur PEMDI KPI.

VII. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan identifikasi kejadian/peristiwa yang mungkin terjadi pada tiap proses pelaksanaan kegaitan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kegiatan.

Manajemen Risiko dalam kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital sebagai berikut :

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
1	Tidak Terlaksananya Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal	Tertundanya Pelaksanaan Rapat dan Pembentukan Tim Kerja dan Jadwal	Mengakibatkan terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya	Penyedia Membuat Tim kerja dan jadwal terlebih dahulu baru dirapatkan kepada tim KPI sehingga mengefesiankan waktu pelaksanaan	**Team Leader**
2	Tidak Terlaksananya Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan Arsitektur PEMDI KPI	Tertundanya Pembahasan Dokumen-Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI sehingga memerlukan waktu lebih lama	Mengakibatkan terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya	- Pembahasan Dokumen – dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI dilaksanakan pada saat Rapat Pembahasan sehingga semua Tim KPI dapat langsung memberikan feedback - Membuat Link Google Drive sehingga dokumen-dokumen dapat dikirim dan dapat terpantau bersama	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
3	Tidak Terlaksananya tinjauan dokumen pendukung	Tertundanya tinjauan dokumen pendukung	Tidak idealnya pengerjaan arsitektur dikarenakan tidak ada dokumen pendukung untuk membuat draft fan melihat kondisi eksisting arsitektur di KPI	- Memfolowup Tim KPI yang belum memberikan Dokumen-Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI	- Tenaga Ahli Manajemen Sistem

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
4	Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker	Tertundanya Penyusunan Rencana pengumpulan data ke Satker	Tidak terpetakannya kondisi as is dan to be disetiap satker	- Membuat Jadwal ke Satker2 Terkait untuk dilakukan pengupulan data terkait dan jadwal disusun bersama KPI	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
5	Kegiatan Workshop Awal	Tertundanya Kegiatan Workshop Awal	Tidak samanya persepsi terkait arsitektur sehingga kurang adanya perhatian terhadap arsitektur KPI yang mana akan mempengaruhi clearance dan Reformasi Birokrasi.	- Melaksanakan Koordinasi Tempat, Waktu dan Tanggal dilaksanakanny a Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Melaksanakan Koordinasi Jumlah Satker-Satker atau Jumlah Orang yang di Undang untuk Menghadiri Kegiatan Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Tersusunnya Undangan Workshop Awal	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
6	Melakukan analisis pencapaian to-be yang sudah terimplementasi	Tertundanya Melakukan analisis pencapaian to-be yang sudah terimplementasi	Tidak terpetakannya kondisi kedepannya atau kondisi yang diharapkan shingga terkena clearance anggaran	- Melakukan Analisis To-Be terhadap Domain Sebagai Berikut : - Domain Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
				dan - Domain Keamanan - Melakukan Tinjauan Langsung Ke Satker Terkait Data-Data Domain tersebut	
7	Draf Arsitektur PEMDI	Tertundanya Draft Arsitektur PEMDI	Tidak adanya panduan atau acuan mengenai arsitektur di KPI dan tidak ada bukti dukung untuk penilaian indeks PEMDI maupun Indeks Pemdi	- Melaksanakan Sinkronisasi Data Satker KPI dengan Sistem Terkait Sehingga Dapat tersusunya Draft Arsitektur PEMDI	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
8	FASE PELAPORAN/ FINALISASI	Tertundanya Finalisasi Dokumen Arsitektur PEMDI	Tidak adanya konfirmasi terkait pekerjaan dan report pekerjaan yang sudah selesai	- Melakukan Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain - Melakukan Revisi terhadap Masukan Dokumen Draf Penyusunan Dokumen Arsitektur PEMDI - Finalisasi Dokumen yang sudah di revisi sehingga dapat dicetak - Penyerahan Dokumen Arsitektur PEMDI KPI.	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia melibatkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Penyiaran indonesia yang tercantum dalam Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran indonesia.

IX. KELUARAN

Keluaran Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia adalah Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia yang komprehensif dan terukur, serta Proses Bisnis yang terintegrasi pada aplikasi SIA SPBE/ SIAP DIGITAL. Selain itu juga untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan tim internal dalam perancangan dan implementasi Pemerintah Digital.

X. SUMBER DANA

1. Sumber dana Kegiatan ini bersumber dari DIPA Komisi Penyiaran indonesia Tahun Anggaran 2026 dengan akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan)
2. Total biaya yang diperlukan Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)

XI. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Analisis Biaya dan Manfaat adalah proses membandingkan total perkiraan biaya dengan total manfaat yang diharapkan dari suatu proyek untuk memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi.

Analisis Biaya dan Manfaat dalam kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

1. Identifikasi / Analisis Biaya

1. Biaya Langsung Personil : Biaya untuk membiayai tenaga ahli, yang sudah mencakup gaji dasar (basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead), dan keuntungan (profit) dihitung berdasarkan Waktu.
2. Biaya Tidak Langsung : Biaya yang dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (at cost) untuk menunjang operasional.

2. Manfaat

Manfaat adalah Strategi Pencapaian Keluaran" atau "Biaya yang Diperlukan". Komponen utamanya meliputi: .

Biaya yang diperlukan :

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi (Rp)
1	Biaya Langsung Personil	Biaya Personil Tenaga Ahli	198.000.000
2	Biaya Tidak Langsung	Biaya Berdasarakan Pengeluaran Riil (At Cost)	2.000.000

Deskripsi Manfaat :

No	Komponen	Deskripsi
1	Biaya (Cost)	Biaya Personil Tenaga Ahli dan Biaya Berdasarakan Pengeluaran Riil (At Cost)
2	Manfaat	Peningkatan Birokrasi, efisiensi waktu, pengurangan risiko, peningkatan kualitas layanan dan memberikan kerangka acuan yang terstruktur untuk membangun sistem yang terintegrasi, dan implementasi yang terukur dan berkelanjutan.
3	Analisis Terhadap Perubahan	Arsitektur bukan hanya sekadar dokumen teknis, melainkan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif.
4	Kesimpulan	Pekerjaan ini menjadikan KPI lebih komprehensif untuk menyelaraskan pemanfaatan teknologi dengan tujuan strategis pemerintahan, mengoptimalkan investasi TIK, serta mengelola risiko dan sumber daya secara efektif dan menjadi langkah esensial untuk membentuk pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

XII. SPESIFIKASI SUMBER DAYA

Untuk menjamin keberhasilan pekerjaan ini maka dibutuhkan Tenaga profesional yang terdiri dari:

1. Tenaga Ahli

a. Team *Leader* (1 orang)

1) Berpendidikan S2 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan dan atau Ilmu Perencanaan.
2) Berpengalaman kerja minimal selama 10 Tahun.
3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
4) Berpengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Menyusun Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
6) Memiliki pengalaman dan kemampuan memimpin tim dalam berkoordinasi dengan tim pokja
7) Memiliki pengalaman dan kemampuan mewakili antara penyedia dan Pemberi Kerja terkait pelaksanaan teknis kegiatan

8) Memiliki Sertifikat IT Project Management yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat megeluarkan sertifikat.

b. Tenaga Ahli Manajemen Sistem (1 Orang)

1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan.
2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 4 Tahun.
3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan.
5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
9) Memiliki Sertifikat IT Enterprise Architecture yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat megeluarkan sertifikat.

c. Asisten Tenaga Ahli (2 Orang)

1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan.
2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 2 Tahun.
3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan.

5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.

6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK

8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.

9) Memiliki Sertifikat Data Management System yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat megeluarkan sertifikat.

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN JASA PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

NO	URAIAN	VOLUME			HARGA SATUAN BIAYA	TOTAL BIAYA
		Satuan	Jumlah Org/Unit	Jumlah Satuan	(Rp)	(Rp)
A	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**					
	1 Tenaga Ahli					
	a. Team Leader	OB	1	2	50.000.000	100.000.000
	b. Tenaga Ahli Manajemen Sistem	OB	1	2	30.600.000	61.200.000
	c. Asisten Tenaga Ahli	OB	1	2	17.600.000	35.200.000
					JUMLAH A	**196.400.000**
B	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**					
	1 **Biaya Operasional Kegiatan**	UB	2	1	1.350.000	2.700.000
					Sub total 1	**2.700.000**
	2 **Biaya Laporan**					
	a. Dokumen Penyusunan Arsitektur	Buku	1	1	750.000	750.000
	b. Soft Copy Flasdisk	Flasdisk	1	1	150.000	150.000
					Sub total 2	**900.000**
					JUMLAH B	**2.000.000**
					JUMLAH A+B	**198.000.000**
					TOTAL	**200.000.000**
Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah						

Dengan catatan :
a. Harga tersebut sudah termasuk pajak
b. Harga tersebut sudah termasuk biaya cetak penggandaan laporan
c.Dasar Harga diatas diambil dari Billingrate Inkindo 2026 dan At Cost

XIII. PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja dan Kerangka Acuan Kerja ini untuk dapat dipahami oleh konsultan sebagai salah satu dasar untuk membuat penawaran.